

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian dilakukan oleh Prasetyo dan tim dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berjudul “Inovasi Sosial dan Kebijakan Daerah Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang”. Tim Peneliti menyimpulkan bahwa: Perlu adanya strategi parsial dengan cakupan meliputi Intensifikasi Pertanian dari Sektor Pertanian Kecil, Sektor Pertanian Komersial yang lebih Dinamis, stimulasi Pertumbuhan Sektor Pedesaan Non Pertanian, Migrasi Orang Muda dan Penyediaan Jaring Pengaman bagi mereka yang “Terperangkap” dalam Kemiskinan (Prasetyo et al., 2019).

2.1.2 Penelitian dilakukan oleh Karina Castro-Arce, dan Franc Vanclay dengan judul “Social Innovation for Sustainable rural Development: An Analytical Framework to Assist Community-based” dengan hasil penelitian bahwa tujuan akhir dari proses perencanaan dan pemerintahan daerah adalah untuk mencapai pembangunan sosial-ekologis. Menyeluruh dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, diharapkan adanya keberlanjutan, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan ini, diperlukan transformasi dalam sistem pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan daerah yang transformative melibatkan perubahan regulasi, praktik perencanaan, dan struktur pemerintahan. Inovasi sosial menciptakan, memperbaharui dan mengubah hubungan sosial dalam pengembangan cara-cara baru bekerjasama untuk mencapai

tujuan masyarakat. Oleh karena itu, dalam inovasi sosial dibutuhkan inovator yang dapat mendorong transformasi wilayah untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi sosial dikembangkan melalui mekanisme tata kelola yang terhubung ke bawah. Inovasi sosial dipicu oleh kepentingan lokal, dalam konteks, waktu dan tempat tertentu (Castro-Arce & Vanclay, 2020).

- 2.1.3 Penelitian dari Tabaklar dan tim yang berjudul “Exploring the microfoundations of dynamic capabilities for social innovation in a humanitarian aid supply network setting” yang melakukan penelitian pada organisasi nirlaba di London, menunjukkan bahwa inovasi sosial dapat dicapai sejauh sejumlah aktor yang berbeda dengan kumpulan keterampilan dan sumber daya yang berbeda berkumpul dan menyatukan kekuatan pelengkap mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu.

Di sini, peran koordinator sangat penting dalam memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan integrasi yang sedang berlangsung di antara para aktor. Peran penting koordinator untuk memfasilitasi atau mempertemukan dari organisasi yang beragam, seperti LSM, organisasi nirlaba, pemerintah, dan lembaga bantuan. Untuk mencapai inovasi sosial, penting untuk mempertimbangkan karakteristik khusus dari pengaturan bantuan, tetapi faktor operasional dan kontekstual yang menjadikan sangat sulit untuk menciptakan rutinitas dan standar yang dapat diprediksi (Tabaklar et al., 2021).

- 2.1.4 Penelitian dari Wibowo dkk, yang dilakukan pada Yayasan Al Barokah, menyatakan bahwa: Inovasi sosial adalah merupakan proses dan hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam kewirausahaan. Berbagai kalangan mulai memperbincangkan konsep kewirausahaan sosial sebagai solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kewirausahaan sosial memiliki berbagai makna dan perspektif, itu berarti makna yang berbeda dan hal yang berbeda untuk orang-orang di tempat yang

berbeda. Adanya yayasan Al Barokah menjadikan salah satu kewirausahaan sosial yang menyelesaikan permasalahan anak yang terjadi selama ini khususnya di daerah Lembur Balong Kota Banjar. Artikel yang bertujuan untuk mengungkap praktik inovasi sosial dalam praktik kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Al-Barokah. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Lembaga atau Yayasan AL-Barokah memiliki inovasi sosial dalam praktik kewirausahaan sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan kelembagaannya. Yayasan AL-Barokah telah mampu menjalankan kegiatan operasional lembaga dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, pengelolaan berbasis inovasi, melakukan upaya penciptaan nilai dan membangun usaha mandiri untuk mendukung operasional aktivitas lembaga. (Wibowo et al., 2021)

- 2.1.5 Penelitian dari Azwar, dkk. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dimensi inovasi sosial yang dilakukan pada program CSR Pertamina Hulu Mahakam Lapangan BSP. Kebijakan revolusi hijau di bidang pertanian pada dekade tahun 1970an berdampak pada menurunnya produktifitas tanah pertanian. Permasalahan selanjutnya terjadi penurunan tingkat regenerasi usia petani. Sementara angka pengangguran usia angkatan kerja ditengah masa pandemi semakin bertambah. Pemerintah dan stakeholder terkait berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menggalakkan pertanian yang ramah lingkungan dan mengampanyekan pemuda untuk kembali bertani. Pertamina Hulu Mahakam BSP sebagai salah satu stakeholder menggalakan program CSR di bidang pertanian bertajuk Petani Maju 4.0.

Program Petani Maju 4.0 memiliki misi untuk membangun kapasitas petani dengan konsep pertanian ramah lingkungan dan regenerasi petani. Misi untuk konsep pertanian ramah lingkungan

dilaksanakan dengan sistem Pertakultur yang dikelola oleh para pemuda milenial di wilayah Ring 1 Pertamina Hulu Mahakam BSP. Proses pengumpulan data dan penyusunan dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif dipilih karena penulis akan menceritakan proses inovasi sosial dalam pengembangan sistem pertanian Pertakultur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan focus grup discussion dengan berbagai stakeholder. Analisa teoritik dilakukan dengan konsep inovasi sosial. Inovasi sosial adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan sistemik di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial ini berupa institusionalisasi, pengembangan kapasitas masyarakat dan menciptakan sistem baru yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem yang berlaku sebelumnya. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa dimensi inovasi sosial sistem pertanian Pertakultur terletak pada unsur kebaruan, mampu untuk menjawab permasalahan, menjadikan manusia sebagai subjek utama penerima program terinstitusionalisasi dalam kelompok-kelompok pertanian. (Azwar1 et al., 2021)

- 2.1.6 Penelitian dari Fahrudi, berjudul “*Alleviating Poverty through Social Innovation*” (pengentasan kemiskinan melalui inovasi sosial) dengan kesimpulan bahwa “Meskipun berbagai program telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, masalah kemiskinan masih tetap ada secara global. Dengan menggunakan konsep inovasi sosial, kewirausahaan sosial dan inovasi hemat, jenis inovasi sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dieksplorasi untuk menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan di UKM dan menyediakan kebutuhan dasar yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Tiga tantangan yang paling mendesak untuk kewirausahaan termasuk kurangnya keuangan, kebijakan pemerintah dan kurangnya kapasitas. Untuk mendukung wirausahawan sosial, ekosistem wirausaha akan diuntungkan dengan

adanya keragaman dalam penyedia sumber daya, organisasi pendukung yang memadai, budaya ekosistem, dan peluang untuk pembelajaran kewirausahaan perwakilan. Hubungan antara universitas, industri dan pemerintah diharapkan dapat mendukung ekosistem kewirausahaan sosial. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan pendanaan awal tanpa membebani pendanaan swasta. Perusahaan sosial yang lebih matang dapat mengakses pendanaan dari bank komersial atau berdampak pada investor. Selain itu, universitas dapat membantu menyediakan program kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha sosial. Sementara pendekatan dalam studi ini dapat bermanfaat untuk mengelola kolaborasi antara sektor swasta dan publik dalam mempromosikan inovasi sosial, pendekatan kontekstual harus dipertimbangkan karena daerah yang berbeda mungkin memiliki peraturan dan budaya yang berbeda. Selain itu, lebih banyak aktor atau heliks dalam model dapat diidentifikasi ketika situasi dan kondisi membutuhkannya (Fahrudi, 2020).

- 2.1.7 Penelitian dari David, berjudul *Emerging Needs of Social Innovators and Social Innovation ecosystem*, yang dilakukan di Austria menunjukkan bahwa: Inovasi sosial berkontribusi untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi banyak tantangan besar yang paling mendesak. Mirip dengan inovasi berorientasi laba, yang dikembangkan oleh organisasi yang ada dan pengusaha berorientasi laba, Inovasi Sosial terutama dikembangkan dan diimplementasikan oleh organisasi dan aktor individu yang ada - inovator sosial. Sementara banyak literatur yang ada meneliti kebutuhan pengusaha berorientasi laba dan menyarankan ekosistem kewirausahaan sebagai pendekatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengusaha berorientasi laba, sedikit yang diketahui tentang kebutuhan yang muncul dari inovator sosial. Dengan melakukan analisis kualitatif mendalam tentang konteks teritorial teladan berdasarkan 28 wawancara semi-terstruktur dan pengumpulan data sekunder, studi eksplorasi ini bertujuan untuk

menjelaskan kebutuhan yang muncul dari para inovator sosial. Selanjutnya, melalui analisis kebutuhan yang teridentifikasi, studi ini mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara ekosistem inovasi sosial dan ekosistem kewirausahaan. Dengan demikian, model ekosistem kewirausahaan Isenberg dimanfaatkan untuk pengembangan model ekosistem inovasi sosial baru. (Audretsch et al., 2022)

- 2.1.8 Penelitian dari Repo, dkk, dengan judul *Social Innovation For Sustainability challenges* (Inovasi Sosial untuk Tantangan Keberlanjutan), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Inovasi sosial berkaitan dengan mobilisasi dan dampak sosial, dan semakin dilihat sebagai pilihan untuk mengatasi tantangan keberlanjutan. Namun demikian, konsep inovasi sosial bersifat cukup terbuka dan memerlukan akomodasi empiris untuk menetapkan perbedaannya dari jenis inovasi lain dalam pengaturan ini. Artikel ini memberikan kontribusi empiris terhadap konsep inovasi sosial karena mengulas kategori faktor keberhasilan inovasi sosial terhadap lima jenis inovasi lainnya (produk, layanan, pemerintah, organisasi, sistem) dalam 202 kasus inovasi yang berfokus pada aksi iklim, lingkungan, efisiensi sumber daya dan bahan baku. Analisis statistik dengan tabel kontingensi diterapkan untuk menguji distribusi lima jenis faktor keberhasilan di seluruh jenis inovasi: ekonomi, lingkungan, politik, sosial, dan teknologi. Hasilnya mengkonfirmasi secara empiris bahwa inovasi sosial memang merupakan jenis inovasi yang berbeda. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam distribusi kategori faktor keberhasilan antara inovasi sosial di satu sisi dan inovasi produk, layanan, dan tata kelola di sisi lain. Selain prevalensi faktor keberhasilan sosial, inovasi sosial ditandai dengan penekanan yang lebih rendah pada faktor keberhasilan politik dan teknologi. (Repo & Matschoss, 2020)
- 2.1.9 Penelitian dari Fahrenwald, dkk, yang mengangkat judul *Social Innovation in Education* (Inovasi Sosial di organisasi Pendidikan dan

Layanan Sosial, Tantangan Aktor dan Pendekatan untuk menumbuhkan Inovasi Sosial). Dalam Makalah ini menyarankan hasil penelitian inovasi sosial, serta pengalaman awal inovasi sosial dalam organisasi layanan sosial untuk dipertimbangkan dalam wacana akademik yang muncul tentang inovasi sosial dalam pendidikan. Inisiatif Inovasi Sosial sebagian besar dimulai dari mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan tertentu kelompok sosial (kelompok pengguna), mereka menggunakan kreativitas dan keragaman sebagai kompetensi inti, kolaborasi, dan kreasi bersama sebagai praktik utama dan memahami lokasi di perbatasan sektoral dan lintas batas sektor publik, swasta, dan non-profit tidak terutama sebagai konflik, tetapi sebagai potensi keragaman dan karena itu kreativitas dalam proses inovasi. Pentingnya lokasi khusus (ruang ketiga) yang memungkinkan penggunaan perbedaan yang produktif antara aktor dan perspektif dalam proses terbuka yang memiliki otonomi dari rutinitas sehari-hari pemberian layanan sosial. Contoh lokasi tersebut adalah laboratorium inovasi sosial, hub, dan akselerator, yang tertanam dalam jaringan inovasi sosial regional. Inisiatif semacam itu kemungkinan akan lebih berhasil, jika pemerintah lokal, regional, atau bahkan nasional menjadi bagian dari jaringan ini dan membantu mengembangkan kondisi lingkungan yang lebih menguntungkan untuk proses inovasi. Laboratorium inovasi sosial dan jaringan regional masing-masing membantu organisasi mengatasi hambatan klasik terhadap inovasi, seperti kurangnya sumber daya, informasi, ruang, dan waktu untuk mengembangkan solusi inovatif. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihat upaya kebijakan nasional maupun Eropa untuk menciptakan kondisi kerangka kerja yang lebih baik bagi ekosistem inovasi sosial di bidang layanan sosial, seperti paragraf yang memungkinkan pendanaan solusi eksperimental, keterlibatan sektor publik dalam dana inovasi sosial dan peningkatan jumlah tender publik untuk proyek inovasi sosial. Pengalaman, tantangan, dan peluang tersebut memberikan wawasan bagi konseptualisasi inovasi sosial di bidang pendidikan. Bidang yang saat ini banyak didorong oleh program reformasi top-down berdasarkan program

pengukuran kinerja siswa dan sekolah. Perubahan yang muncul dari program reformasi yang didorong oleh pemerintah tersebut dapat dan tidak boleh dengan mudah disebut sebagai inovasi sosial.

- 2.1.10 Penelitian dari Mieke Van Der, dkk, dengan judul “*Problem Framming Expertise in Public and Social Innovation*” (Keahlian Pembingkai Masalah dalam Inovasi Publik dan Sosial), menunjukkan bahwa: Organisasi sektor publik dan sosial semakin beralih ke inovasi sebagai cara untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi masyarakat. Praktik desain telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inovasi publik dan sosial, tetapi agar efektif di tingkat publik dan sistem sosial, praktik ini harus disesuaikan. Studi ini menyelidiki bagaimana lima lembaga inovasi publik dan sosial mengadaptasi dan menggunakan praktik desain inti pembingkai masalah untuk mengatasi masalah kompleks di masyarakat. Bingkai berevolusi menurut pola nonlinier melalui evolusi bersama ruang masalah dan solusi. Praktisi mengadaptasi praktik pembingkai mereka agar sesuai dengan konteks sosial yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip desain sistemik, mengejar berbagai solusi dan kerangka masalah, dan mengoperasionalkan metode penelitian dan pemikiran yang lebih luas yang selaras dengan sifat kompleks dari setiap tantangan spesifik. Saya berpendapat bahwa praktik semacam itu membutuhkan keahlian tingkat tinggi, dan bahwa pembangunan kemampuan dalam inovasi publik dan sosial harus mempertimbangkan praktik dan tingkat keahlian yang muncul ini. (Bijl-Brouwer, 2019)

Dari berbagai penelitian sebelumnya, rata-rata menggunakan teori dimensi/ unsur/dinamika inovasi sosial atau hal-hal apa saja yang harus ada untuk bisa dikatakan sebagai inovasi sosial, diantaranya organisasi, komunitas, prinsip design, produk, tatakelola, layanan, system, dan pentingnya peran inovator untuk mendorong terjadinya inovasi sosial. Selain itu, bidang yang diteliti juga terdapat perbedaan, seperti Prasetyo dan juga azwar yang meneliti pada bidang pertanian saja; Karina meneliti pihak pemerintah sebagai inovator; sedangkan Tabaklar, hanya menyoroti pentingnya koordinator dalam sinergi dan kolaborasi dari

berbagai pihak; Kemudian Wibowo, membahas pentingnya inovasi sosial untuk mempertahankan operasional dan mendukung usaha mandiri sebuah Yayasan;

Sementara David, melakukan penelitian bertema inovasi sosial yang berorientasi pada laba sebuah perusahaan / CSV (*Corporate Social Value*); Repo, lebih berorientasi pada rendahnya pengaruh inovasi sosial terhadap pengembangan teknologi dan politik; Fahrenwald, menyoroti pentingnya laboratorium inovasi sosial guna melakukan berbagai penelitian dari setiap progress atau perkembangan yang terjadi di masyarakat;

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji melalui teori Social Innovation Six Stage Model atau 6 tahapan yang harus dilalui dalam inovasi sosial.

2.2 Inovasi Sosial

2.2.1 Definisi

Inovasi sosial digunakan sebagai mekanisme dalam menjawab tantangan sosial, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan perubahan iklim (Pel et al., 2020). Inovasi sosial merupakan penemuan, pengembangan dan implementasi ide baru untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh individu, kelompok atau masyarakat (Meng et al., 2020).

Solusi baru ini muncul melalui kolaborasi lintas sektor informasi dan berbagi sumber daya yang bertujuan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat dalam memecahkan tantangan sosial yang kompleks dan menciptakan perubahan (Avelino et al., 2020). Tantangan sosial, seperti perubahan iklim, mobilitas perkotaan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan

konflik kekerasan, membutuhkan solusi baru, berkelanjutan, dan inovatif secara sosial (van Wijk et al., 2019).

Di luar studi organisasi dan manajemen, teori dan aplikasi juga terjadi dalam studi perkotaan, manajemen teknologi, sosiologi, nirlaba, administrasi publik dan kebijakan publik. Definisi lebih detail disampaikan Mc Murray, yang menyatakan bahwa “inovasi sosial adalah setiap inisiatif, produk, proses, program, proyek atau platform yang menantang dan dari waktu ke waktu berkontribusi untuk mengubah rutinitas, dan sumber daya dari sistem sosial yang lebih luas, inovasi sosial yang sukses memiliki daya tahan, skala, dan dampak transformative. Inovasi sosial menggambarkan relasional, mengembangkan, mempromosikan, dan menerapkan solusi baru untuk masalah sosial dengan cara yang diarahkan untuk menghasilkan perubahan besar” (Albertine McGowan & Westley, 2017).

Dari perspektif kebijakan, Leadbeater mengemukakan bahwa inovasi sosial memberikan jawaban yang efektif terhadap masalah sosial dalam kasus di mana negara telah gagal untuk mengatasi masalah tersebut. Inovasi sosial dapat menjadi obat untuk banyak penyakit sosial dan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi biayanya (Leadbeater, 1997). Menurut (Danielle, 2020) terdapat tiga kerangka dalam inovasi sosial diantaranya adalah: (1) sebagai bentuk penciptaan, penangkapan, dan distribusi nilai sosial; (2) sebagai konsep bersama yang diperlukan dalam kolaborasi lintas sektor; dan (3) sebagai upaya untuk perubahan kelembagaan. (Anderson et al., 2015) mendefinisikan bahwa inovasi sosial adalah kombinasi baru dan/atau konfigurasi baru dari praktik sosial dalam area tindakan atau konteks sosial yang didorong oleh aktor atau konstelasi tertentu dengan cara yang ditargetkan secara sengaja dengan tujuan untuk memuaskan atau menjawab dengan lebih baik kebutuhan dan masalah dari pada praktik yang sudah ada. Dan inovasi sosial yang efektif adalah solusi baru untuk tantangan sosial yang memiliki maksud dan efek kesetaraan, keadilan dan pemberdayaan.

Menurut (Audretsch et al., 2021) kebijakan publik dapat meningkatkan penawaran dan permintaan inovasi sosial dari masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih luas di mana inovasi sosial dapat berkembang. Lima bidang kegiatan di mana pembuat kebijakan publik memiliki peran yang jelas untuk dimainkan dalam mendukung inovasi sosial diantaranya adalah:

2.2.1.1 Pendanaan untuk Inisiasi, Peningkatan dan Inovator

Pendanaan menempati urutan teratas daftar kebutuhan dari proses inovasi sosial, pendanaan dapat bersumber dari hibah dan investasi. Pembuat kebijakan memprioritaskan anggaran pada inovasi sosial sebagai investasi bagi inovator sosial - seperti inkubator dan akselerator. Atau memberikan dukungan kepada inovator dalam melakukan program atau kegiatan penggalangan dana.

2.2.1.2 Peraturan Pendukung Dan Kerangka Hukum

Organisasi yang inovatif secara sosial sering kali tidak cocok dengan bentuk kelembagaan tradisional, yang dapat menyebabkan masalah - misalnya, tidak semua instansi sosial dapat mengakses pendanaan. Para inovator sosial membutuhkan kerangka hukum untuk memenuhi kebutuhannya. Regulasi dapat merangsang atau menghambat inovasi sosial; misalnya seputar bentuk pembiayaan baru (seperti *crowdfunding*) dan model baru yang dikembangkan dalam inisiatif kolaboratif. Pelaku pada sektor ini telah menyerukan 'regulasi cerdas' yang memungkinkan ruang untuk inovasi dengan tetap melindungi konsumen dan warga negara.

2.2.1.3 Membuka Proses Pengadaan Umum

Pemerintah dan lembaga publik adalah 'pelanggan' potensial yang penting untuk inovasi sosial. Dalam perannya sebagai penyandang dana, dan penyedia layanan publik, lembaga publik memiliki kemampuan untuk membantu para inovator sosial mengembangkan dan menguji solusi, membuat mereka bekerja dan membawanya ke skala yang lebih besar. Tetapi ini hanya dapat berhasil jika proses pengadaan terbuka untuk inovator sosial dari berbagai bentuk organisasi - organisasi kecil atau

besar, sektor masyarakat, ekonomi sosial serta sektor swasta atau organisasi publik.

2.2.1.4 Menggunakan Aset Publik Dengan Cara Inovatif Sosial

Membuka akses pada aset publik dapat merangsang inovasi sosial. Misalnya, laporan Kebijakan untuk Kota yang dapat dibagikan merekomendasikan bahwa pembuat kebijakan harus memfasilitasi ekonomi berbagi di tingkat lokal melalui intervensi seperti mengizinkan penduduk di tingkat lokal melalui intervensi seperti mengizinkan penduduk untuk menyewa tempat parkir perumahan untuk berbagi kendaraan, menetapkan jalur untuk berbagi tumpangan, memberikan insentif untuk pertanian perkotaan di lahan kosong, dan memfasilitasi penggunaan sementara ruang komersial yang tidak terpakai. Ini tidak hanya berlaku untuk aset fisik, tetapi juga aset virtual. Inovator sosial digital telah menyerukan lebih banyak keterbukaan data publik untuk merangsang inovasi.

2.2.1.5 Meningkatkan Kesadaran Dan Membangun Keterampilan

Pembuat kebijakan dapat membantu meningkatkan legitimasi dan visibilitas inovasi sosial melalui inisiatif yang memetakan dan mengukur aktivitas, dan berupaya mengukur dampak dan kontribusinya. Proyek. Menetapkan cetak biru untuk mengukur inovasi sosial, yang akan memberikan dasar bukti yang baik untuk pembuat kebijakan nasional atau regional dan menginformasikan langkah-langkah kebijakan baru. Sementara itu, peningkatan kesadaran juga penting di dalam dan di antara para pelaku inovasi sosial. Misalnya, *crowd funding* untuk tujuan baik hanya sedikit organisasi dan komunitas yang mengetahui model *crowd funding* yang berbeda dan bagaimana dapat digunakan, sehingga direkomendasikan agar pembuat kebijakan mempromosikan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam menggunakan model penggalangan dana ini.

Dari kumpulan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi sosial adalah pendekatan sosial baru yang bertujuan untuk memperluas kesejahteraan sosial masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 2.2.1.5.1 kolektivitas dan peran gerakan sosial dan aksi kolektif dalam menghasilkan nilai sosial;
- 2.2.1.5.2 keragaman dan peran interaksi multi disiplin dan lintas sektor dalam menghasilkan nilai sosial; dan relasionalitas, peran menciptakan saluran dan konfigurasi relasional baru dalam menghasilkan nilai sosial.

2.2.2. Dinamika Inovasi Sosial

Proses dan dinamika dalam inovasi sosial menurut (KHUTRAKUN, 2013) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.2.2.1 Pemikiran kreatif dari seorang inisiator yang ada di dalam kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi di komunitas tersebut.
- 2.2.2.2 Implementasi atau uji coba gagasan, pada saat ini ide yang dicetuskan sudah mulai diaplikasikan dalam kelompok masyarakat tetapi masih sedikit partisipasi komunitas yang terlibat. Terkadang aplikasi demikian sulit dilakukan karena tidak mudah dilakukan.
- 2.2.2.3 Praktek inovasi sosial sudah dilakukan secara merata oleh semua anggota komunitas secara efisien dan efektif sehingga mengubah pola perilaku komunitas tersebut.
- 2.2.2.4 Inovasi sosial yang terjadi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awal tetapi sudah mengalami perluasan manfaat bagi komunitas tersebut.
- 2.2.2.5 Inovasi sosial yang sangat matang di mana aplikasinya sudah menyebar melampaui manfaat pada tujuan awal dan bahkan dipergunakan oleh masyarakat di luar komunitas awal.

2.2.3 Unsur Inovasi Sosial

Program atau kegiatan, dapat dikatakan sebagai inovasi sosial, menurut (D. M. Logue, 2019) paling tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 2.2.3.1 Nilai sosial: tujuan utama inovasi sosial adalah peningkatan hasil sosial yang diperoleh untuk kemanfaatan kolektif daripada keuntungan pribadi.
- 2.2.3.2 Sumber: didorong oleh individu, organisasi atau gerakan sosial; individu dan organisasi ini mungkin berada di dalam organisasi yang sama atau di luar organisasi.
- 2.2.3.3 Makna: sementara inovasi sosial dapat mengejar perubahan sistem skala besar (atau masalah sosial yang memerlukan perubahan sistem), diakui bahwa perubahan bertahap juga dapat bertransformasi dalam jangka Panjang.
- 2.2.3.4 Kolektivitas: inovasi sosial sering (namun tidak selalu) terjadi sebagai proses kolaboratif atau lebih tepatnya partisipatif; ini karena banyak masalah sosial yang tidak dapat ditangani oleh satu organisasi atau satu sektor saja.
- 2.2.3.5 Perbedaan: Mengingat hal di atas, keragaman aktor dan disiplin sering terlibat dalam proses inovasi sosial.
- 2.2.3.6 Relasionalitas: saluran atau konfigurasi relasional baru seringkali perlu dibentuk dan dilembagakan sebagai bagian dari kolaborasi ini; namun infrastruktur koordinasi untuk mencapai ini dapat bervariasi dan bersifat sementara.

2.2.4 Tahapan Inovasi Sosial

Pada penciptaannya, inovasi sosial membutuhkan proses dari berbagai tahapan, agar solusi kebaruannya dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat luas. (Murray et al., 2010) membagi proses ini ke dalam enam tahapan sebagai berikut:

- 2.2.4.1 *Prompts, inspirations and diagnoses*, yaitu proses menemukan akar masalah sosial dan membuat bingkai rumusan masalah dengan tepat.

- 2.2.4.2 *Proposals and ideas*, yaitu proses mencari solusi atau ide pemecahan masalah dengan partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
- 2.2.4.3 *Prototyping and pilots*, yaitu purwarupa dalam tahapan uji coba ide inovasi untuk melihat apakah layak untuk diterapkan dan mampu mengatasi persoalan
- 2.2.4.4 . *Sustaining*, yaitu keberlanjutan inovasi setelah melalui tahapan uji coba. Inovasi membutuhkan elemen-elemen berikut untuk dapat berlanjut; model bisnis, model kontrol dan pengelolaan, pendanaan, jejaring dan komunikasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan perencanaan pengembangan.
- 2.2.4.5 *Scaling and diffusion*, yaitu proses promosi atau ‘pemasaran’ ide inovasi sosial kepada masyarakat melalui berbagai platform dan jejaring kolaborasi.
- 2.2.4.6 *Systemic change*, yaitu terciptanya perubahan sosial yang sistemik yang didukung oleh beberapa faktor seperti, kerjasama lintas sektor, pelibatan pakar, proses pendampingan dan pelatihan untuk membentuk keterampilan dan sikap, pembuatan kebijakan atau peraturan yang mendukung proses inovasi sosial, serta pemberdayaan penerima manfaat inovasi sosial.

Gambar 2.1 Tahapan / Proses Inovasi Sosial



Sumber: *Social Innovation Six Stages Model*, (Murray et al., 2010)

2.3 Filantropi

Sebagian besar terminologi filantropi diimpor dari tradisi *Anglo-Saxon* terlepas dari apakah istilah itu sesuai dengan keadaan setempat atau tidak. Ada ambivalensi dalam istilah filantropi itu sendiri bahkan di tempat-tempat di mana ia tampaknya dipahami dengan baik. Jika melibatkan menerjemahkan sebuah kata atau konsep, maka ambivalensi ini akan lebih terasa. Terlepas dari bagaimana istilah ini diterjemahkan di berbagai negara, baik secara harfiah dan kiasan, ada kemungkinan bahwa konotasi dari istilah filantropi akan berubah secara signifikan bahkan di negara-negara global dan perubahan itu akan menjadi perubahan generasi. Pada awal tahun ini, *Hilary Pearson* dari *Philanthropic Foundations of Canada* dan *Jean-Marc Fontan* dari *University of Quebec di Montreal* menyatakan dalam majalah *Alliance*, bahwa 'filantropi tidak lagi hanya tentang berbuat baik. Tetapi tentang bagaimana memberikan solusi pada masalah kompleks yang dihadapi oleh generasi berikutnya.

Untuk Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) di Brasil, hal ini bermakna “transfer sukarela pendanaan swasta dalam cara yang terencana, terpantau dan sistematis untuk proyek sosial, lingkungan, dan budaya yang menjadi kepentingan publik.” Sedangkan bagi Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) di Argentina adalah 'penggunaan sumber daya swasta yang bertanggung jawab, proaktif dan strategis di mana pengembalian yang diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dalam jangka panjang. Masyarakat Meksiko menggunakan istilah filantropi dan menekankan aspek emosional dan moralnya: 'Filantropi adalah ungkapan sebuah dorongan kedermawanan. Di luar sektor itu sendiri, istilah filantropi kurang diterima secara luas di Tiongkok, usul Yanni Peng dari Narada Foundation. Undang-undang badan amal yang diumumkan pada tahun 2016 menggunakan istilah yang diterjemahkan secara harfiah sebagai amal, tetapi ada istilah Tiongkok lain yang digunakan yang memiliki arti kebaikan publik.

Di wilayah Arab, meskipun berderma adalah hal yang biasa, dan derma dalam skala besar, melalui gagasan wakaf, dikenal secara luas, namun istilah filantropi lazim digunakan oleh orang-orang yang terkena pengaruh Barat, ungkap Atallah Kuttub dari SAANED for Philanthropy Advisory di Wilayah Arab. Menurut Basak Ersen, di Turki filantropi lebih dipahami sebagai amal dan umumnya memiliki konotasi tradisional dan keagamaan. Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh Third Sector Foundation of Turkey (TUSEV), sebagian besar orang Turki melihatnya sebagai bentuk bantuan kepada perseorangan: 40% melihatnya sebagai 'membantu masyarakat miskin dan mereka yang membutuhkan' dan 28,5% menggambarkannya sebagai 'membantu orang lain, berbuat baik.' Yang menarik, meskipun ada banyak yang menganggap tindakan tertentu sebagai filantropi – misalnya, memberikan beasiswa, membangun sekolah, dll – namun mereka tidak melihat 'pendidikan' termasuk ke dalam kategori kegiatan filantropi. Hal ini mulai berubah, namun seperti di tempat lain, pemahaman yang lebih 'barat' tentang istilah ini hanya dipahami oleh para profesional filantropi (Bellegy et al., 2018)

Filantropi Islam didasarkan pada konsep zakat, yaitu amal yang diwajibkan, dan infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Walaupun zakat dari penghasilan dan harta diwajibkan bagi umat Islam, di Indonesia negara tidak memaksa orang Islam untuk membayarkannya. Banyak muslim yang menyalurkan amalnya secara langsung kepada yang membutuhkan, atau memberikannya ke masjid.

Sejak Orde Baru, pemerintah Indonesia mencoba mendorong pembayaran zakat ke organisasi resmi. Pengelolaan zakat oleh organisasi ini menciptakan sumber daya untuk mendukung inisiatif jangka panjang yang menjawab permasalahan mendasar penyebab kemiskinan dan isu-isu sosial lain. Baik disalurkan melalui organisasi resmi maupun tidak, praktik filantropi yang begitu meluas di Indonesia ini telah memungkinkan beragam lembaga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat muslim.

2.4 Filantropi Islam

Filantropi tidak bisa dilepaskan dari isu pemberdayaan Masyarakat (Heslop, 2020). Kegiatan filantropi Islam di Indonesia telah mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Beberapa organisasi masyarakat dan lembaga negara mempromosikan aktivitas filantropi Islam sebagai sarana menumbuhkan keadilan sosial. Filantropi Islam, jika dikelola secara profesional dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Filantropi dianggap dapat mengatasi permasalahan kontemporer manusia. Nilai-nilai sosial yang terdapat di dalamnya merupakan bagian dari sifat-sifat pro-sosial manusia. Filantropi sesungguhnya bukan hanya sekadar memberi namun lebih kepada pembelaan bagi para kaum mustad'afin. Keterlibatan masyarakat, negara, lembaga sosial, dan yang lainnya merupakan tujuan inti dari gerakan filantropi agar umat manusia terbebas dari kesengsaraan dan kemiskinan (Lestari, 2019).

Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam. Urgensi zakat yang merupakan anjuran Islam untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada yang berhak sesuai ketentuan, memiliki nilai signifikan dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia, dituntut untuk selalu berinteraksi dan berbagi kepada sesama, baik berupa materi maupun non materi. Zakat merupakan kewajiban yang mengandung nilai-nilai filantropi sangat tinggi, karena telah membantu sesama serta mengurangi kesenjangan (Don et al., 2020). Menguatnya kembali harapan banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam bentuk zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari kondisi ekonomi kebangsaan dan kemiskinan yang berkepanjangan (Quinn Patton et al., 2015). Kondisi ini berakibat kesenjangan penguasaan ekonomi antar warga negara menjadi semakin lebar. Pada saat itulah, potensi filantropi Islam kembali dilirik dan diharapkan menjadi alternatif solusi terhadap problem kebangsaan (Don, 2020).

Adapun tugas utama Lembaga Filantropi Islam atau Lembaga Amil Zakat adalah:

- 2.4.1 Penghimpunan;
- 2.4.2 Pengelolaan; dan
- 2.4.3 Penyaluran.

2.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan target yang telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh 193 negara pada tahun 2015 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator yang harus dicapai pada tahun 2030. SDGs dirancang dengan tidak mengabaikan nilai dan prinsip hak asasi manusia, memperjuangkan kesamaan hak antar makhluk sosial, memperhatikan kebutuhan atau keperluan di masa mendatang, dan menyamakan hak antar makhluk sosial baik dalam hal kesejahteraan, kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk pencapaian hal tersebut. Melalui penerbitan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 dan menginstuksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar menyiapkan peta jalan dan Rencana Aksi Nasional hingga 2030 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDGs. Dan mendorong pelibatan semua pihak dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah.

Terdapat 17 poin tujuan SDGs, yang diupayakan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan tersebut adalah: Menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, mengurangi ketimpangan, membangun

kota aman dan tangguh, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, perubahan iklim, sumber daya alam, ekosistem darat dan laut, perdamaian, dan kemitraan (BPS, 2021)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs mencerminkan konsep normatif dan pemikiran yang kompleks. Dalam arti normatif, tujuan ini membayangkan sebuah masyarakat di mana terdapat kemakmuran ekonomi, kelestarian lingkungan, pemerintahan yang baik, inklusi sosial dan kohesi. Dengan demikian, SDGs 'menganjurkan pemerataan dan pembangunan ekonomi yang peka terhadap lingkungan. Di sisi lain, aspek kompleksitas berhubungan dengan berbagai interaksi, keterkaitan dan saling ketergantungan antara sistem sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Dengan demikian, hal ini menggerakkan pemahaman kita dari linear ke pemahaman evolusioner dan terbuka tentang pembangunan. SDGs tidak hanya 'cetak biru pembangunan' untuk negara berkembang, tetapi juga berlaku untuk negara maju dan oleh karena itu menjauhkan pembangunan dari solusi sederhana, reduksionis, dan ideal untuk mengatasi masalah global. Dengan latar belakang ini, meskipun SDGs merupakan kelanjutan dari urusan MDGs yang belum selesai, namun memiliki fokus pada gagasan pembangunan yang berpusat pada manusia, planet, kemitraan, dan berbasis kemakmuran. Kompleksitas SDGs diakui dalam proses konsultatif yang melingkupi desainnya. Sementara SDGs berusaha untuk menjadi inklusif.

Aspek penting lain dari perlunya pemikiran kompleksitas berkaitan dengan dominasi agenda pembangunan global oleh neoliberalisme, dengan fokus yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi sebagai mesin pengentasan kemiskinan. SDGs tampak kontradiktif karena mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan keberlanjutan. Namun, memenuhi tujuan ekonomi datang dengan mengorbankan keberlanjutan. SDGs mendukung agenda neoliberal di mana pertumbuhan ekonomi dianggap identik dengan keberlanjutan. Selain itu, fokus pembangunan ekonomi dipelopori oleh partisipasi sektor swasta dalam SDGs. Hal ini menciptakan ruang bagi institusi neoliberal termasuk Bank Dunia dan perusahaan multinasional untuk memajukan

kepentingan mereka di bawah retorika kemitraan global sebagaimana ditekankan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan berisiko menjadi 'bisnis seperti biasa' dari pada upaya sadar untuk meningkatkan kondisi kehidupan orang miskin karena motif mencari keuntungan. Keterlibatan, misalnya, sektor swasta akan memperkuat agenda dominan neoliberal yang ditandai dengan meningkatnya ketimpangan dan dinamika kekuasaan yang tidak menguntungkan. Kritik semacam itu menuntut SDGs untuk bergerak melampaui 'neoliberalisme seperti biasa' menuju pemahaman pembangunan yang kompleks. Ini mengakui bahwa tantangan pembangunan global tidak dapat diselesaikan dengan hanya berfokus pada 'satu model' (yaitu pertumbuhan ekonomi) tetapi lebih pada kebutuhan akan pemikiran baru tentang pembangunan. Ini termasuk mengatasi kendala struktural, kelembagaan dan normatif dan ketidakseimbangan kekuatan dalam ekonomi dunia (Kumi, 2019).

Filantropi telah tumbuh dan mendapatkan visibilitas di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat lembaga filantropi dalam mendukung agenda pembangunan global, termasuk SDGs, melalui penyediaan sumber daya keuangan dan non-keuangan. Mengingat perubahan baru-baru ini dalam lanskap pembiayaan pembangunan yang ditandai dengan pergeseran dari pemahaman yang sempit tentang bantuan pembangunan resmi ke mekanisme pembiayaan lain yang lebih luas, lembaga filantropi telah menjadi aktor penting dalam agenda nasional dan internasional. Dalam hal ini, lembaga filantropi terus memainkan peran penting seperti menyelaraskan kegiatan mereka dengan prioritas pemerintah pusat dan SDGs (Johnson, 2018). Di negara-negara yang mengalami penarikan donor dan pengurangan bantuan, lembaga filantropi telah menyediakan sumber daya keuangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang kritis (Callias & Grady, 2017).

Dari landasan teori diatas yang terdiri dari teori inovasi sosial, teori Filantropi, Filantropi Islam, dan Capaian terhadap Tujuan Pembangunan

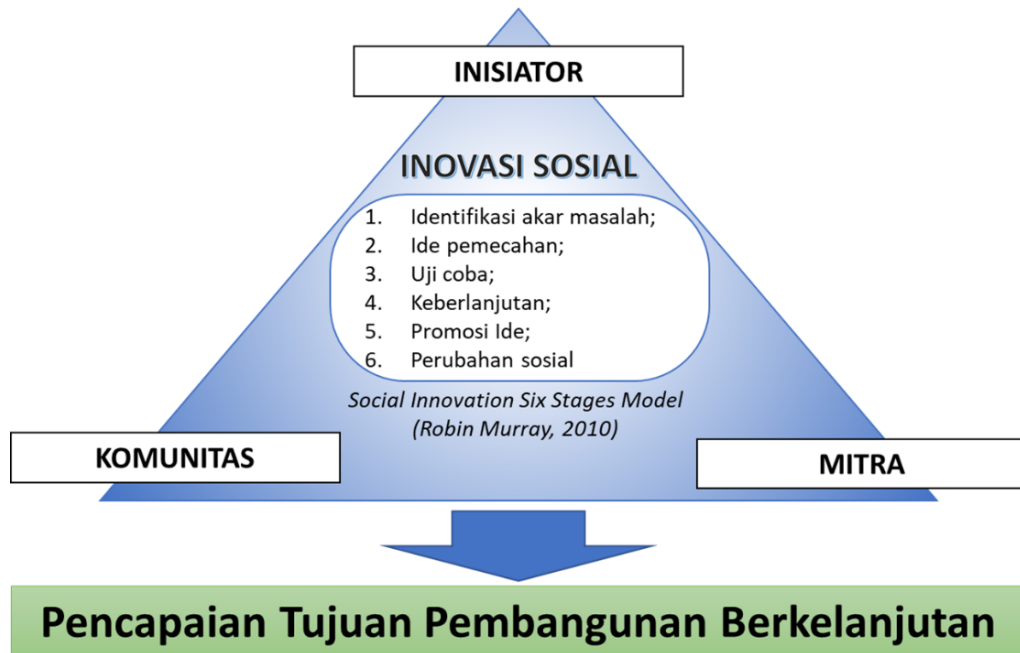
Berkelanjutan yang dijalankan oleh LAZISMU, peneliti beranggapan bahwa pada saat ini merupakan era pembaharuan pengelolaan lembaga filantropi. Dimana program-program yang dijalankan harus memiliki dampak sosial yang terukur dan dapat dievaluasi. Konsep inovasi sosial yang juga diusung oleh LAZISMU pada Rakernas tahun 2021, dimaknai sebagai ijtihad dan tajdid di lingkungan Muhammadiyah.

Peneliti menggunakan teori tahapan inovasi sosial dari Robbin Murray, sejalan dengan konsep inovasi sosial yang saat ini sedang dikembangkan oleh LAZISMU secara nasional.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari angka kemiskinan, kesenjangan, dan kondisi UMKM di Indonesia yang selama pandemi covid-19 mengalami banyak penurunan hasil usaha. Potensi Filantropi Islam yang sangat tinggi, diharapkan dapat berperan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui inovasi sosial yang dapat menjawab berbagai permasalahan di masyarakat. Adapun kerangka berpikir dalam penulisan ini, dibangun melalui peran lembaga filantropi sebagai inisiator dengan ide atau gagasan kreatif untuk terjadinya inovasi sosial dengan melibatkan mitra dan komunitas. Inovasi sosial akan terwujud dengan adanya kesepakatan untuk berkolaborasi dalam program bersama dan pelibatan berbagai pihak, dan tahapan dalam inovasi sosial menurut (Murray et al., 2010) meliputi: identifikasi akar masalah, ide pemecahan masalah, uji coba, keberlanjutan, proposi ide, dan perubahan sosial dapat dijalankan. Dalam pelaksanaan program, diperlukan pendampingan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program dapat berjalan secara terus menerus serta dilakukan pengukuran atas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peneliti menganggap teori ini yang paling sesuai untuk mengukur tahapan program inovasi sosial, karena sejalan dan terdapat banyak kesamaan dengan konsep inovasi sosial yang dibangun dan dikembangkan oleh LAZISMU.

Gambar 2.2 Alur Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti